



## AKTIVITAS ORANG TIONGHOA DI KESULTANAN PANAI, LABUHAN BILIK: SEBUAH KAJIAN HISTORIK

Yushar Tanjung\*

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

### Abstract

*This paper traces the presence and activities of the Chinese community in Labuhan Bilik, which was the center of the Panai Sultanate government which developed into a trading port after the Dutch colonial government developed economic activities in East Sumatra through the opening of plantations. Labuhan Bilik has developed so that it attracts the outside community to participate in trade activities, especially the Chinese community. They have been in Labuhan Bilik since 1875 and are active traders conducting trade transactions with traders in the Malay Peninsula and Singapore. Their presence received a welcome from the Panai Sultanate government and received protection in the intention of providing a place to live. The Dutch colonial government facilitated it by appointing their group members to become Kapitan who functioned as coordinators and liaisons with the government. Meanwhile, the Sultan approved the appointment of the citizens of the Sultanate to become Kerani for the Chinese community to connect them with the Sultanate. They successfully traded until Indonesia became independent during the Old Order. After that their activities faded along with the changing political and economic order in Indonesia so that they now do not play a role anymore because many have moved to other regions.*

*Keywords: Chinese community; trade; political-economy policy.*

### Abstrak

Tulisan ini menelusuri kehadiran dan aktivitas masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik yang merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Panai yang berkembang menjadi bandar perdagangan setelah pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan kegiatan perekonomian di Sumatera Timur melalui pembukaan perkebunan. Labuhan Bilik mengalami perkembangan sehingga menarik masyarakat luar untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan terutama masyarakat Tionghoa. Mereka sudah ada di Labuhan Bilik sejak 1875 dan menjadi pedagang yang aktif melakukan transaksi perdagangan dengan pedagang di Semenanjung Malaya dan Singapura. Kehadiran mereka dapat sambutan dari pemerintahan Kesultanan Panai dan mendapat perlindungan dalam ujud memberi tempat bermukim. Pemerintah Kolonial Belanda memfasilitasi dengan mengangkat anggota kelompok mereka menjadi Kapitan yang berfungsi sebagai kordinator dan penghubung dengan pemerintah. Sedangkan Sultan merestui pengangkatan warga Kesultanan menjadi Kerani bagi masyarakat Tionghoa untuk menghubungkan mereka dengan pihak Kesultanan. Mereka sukses berdagang sampai Indonesia merdeka masa Orde Lama. Setelah itu kegiatan mereka pudar seiring berubahnya tatanan politik dan ekonomi di Indonesia sehingga mereka sekarang tidak berperan lagi karena banyak yang pindah ke daerah lain.

Kata Kunci: Masyarakat Tionghoa; perdagangan; kebijakan politik-ekonomi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan yang terjadi di Sumatera Timur merupakan gejala historik yang dapat ditelisik secara historik. Dialektika yang terjadi di sini berkaitan dengan pembukaan kawasan perkebunan oleh bangsa Asing/Belanda dalam upaya meluaskan jaringan sumber daya ekonomi berbasis penyediaan barang untuk pasar internasional yang ditandai dengan pembukaan kebun tembakau di wilayah kekuasaan Kesultanan Deli. Pembukaan perkebunan ini menjadi daya tarik para pemodal dan pencari kerja dari daerah lain di sekitar Kesultanan Deli, sehingga jadilah daerah ini menjadi primadona bagi

Article History | Submitted: June 28, 2020 | Accepted: August 22, 2020 | Published: August 23, 2020

How to Cite (APA 6<sup>th</sup> Edition style):

Tanjung, Yushar. (2020). Aktivitas Orang Tionghoa di Kesultanan Panai Labuhan Bilik: Sebuah Kajian Historik. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 69-77.

DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2605

\*Correspondance Author: [tanjungyushar@gmail.com](mailto:tanjungyushar@gmail.com)

pendatang yang hendak meningkatkan taraf hidup dan pengembangan kewirausahannya. Secara empirik tidak dapat dipungkiri bahwa pembukaan lahan perkebunan mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan perkembangan kawasan ini sebagai sentra ekonomi.

Pembukaan kawasan Deli yang terletak di daerah Medan sekarang menjadi sumber ekonomi dan perdagangan telah menarik minat masyarakat luar secara luas untuk berperan serta sehingga menimbulkan terbentuknya kawasan baru sebagai tempat interaksi dan integrasi masyarakat yang multietnis. Perkembangan yang pesat di tanah Deli membawa berkah bagi masyarakat dari kawasan lain sebagai tujuan migrasi sehingga mendorong terbentuknya bandar-bandar baru menjadi tujuan untuk meningkatkan kualitas penghidupan. Tumbuhnya bandar-bandar baru dapat ditemukan di pesisir timur Sumatera Utara dari utara ke selatan yang berperan juga dalam perdagangan internasional dengan pemanfaatan jalur komunikasi laut yang mampu mengalirkan sejumlah besar produk perdagangan dengan menggunakan kapal dan perahu dalam jaringan perdagangan internasional.

Melalui jasa pelabuhan mendorong munculnya bandar baru sebagai pemukiman yang dapat menjamin hajat hidup bagi yang mencoba melibatkan diri dalam sektor penghidupan baru yakni perdagangan dan jasa. Daya tarik sektor ini menjadi magnet sehingga mampu menggerakkan berbagai elemen masyarakat lintas etnik dan bangsa dalam membentuk satu wadah interaksi permanen dalam ujud pemukiman. Banyaknya pemukiman baru yang tumbuh dengan ciri yang hampir serupa di sepanjang garis Pantai Timur Sumatera Utara, di utara ada Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, ke Timur ada Pantai Cermin Cermin, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah Batubara dan tentu saja Tanjung Balai.

Atmosfer kota-kota di wilayah pantai lebih kosmopolitan di mana pedagang-pedagang asing dan perajin ahli merupakan proporsi penduduk yang besar dan mempunyai kontak dengan negara luar (Wertheim, 1999, p. 134). Selain kota-kota di atas ada satu kawasan yang tumbuh dengan pesat yakni Pelabuhan Labuhan Bilik yang terletak paling Selatan dari Sumatera Utara. Kota ini sejatinya adalah pusat pemerintahan Kerajaan Panai yang telah terikat dengan pemerintah Belanda. Semula Pemerintahan Kesultanan Panai bertuan atau vassal dari Kesultanan Siak setelah Kesultanan ini menyepakati kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 1 Pebruari 1858 bahwa Sultan dan orang-orang Siak dan turunannya serta Kerajaan Siak dan Rantau jajahan takluknya merupakan bahagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kedaulatan agung Belanda termasuk Kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur (Sinar, 2006, p. 184) isin kontrak ini pengakuan terhadap Pemerintah Belanda. Sebagai kawasan yang berada dalam lingkup politik Hindia Belanda yang telah masuk jauh ke wilayah politik dan administrasi pemerintahan, maka Kesultanan Panai menerima imbas perkembangan di wilayah ini, Labuhan Bilik menjadi pelabuhan yang berperan dalam lintas perdagangan di Selatan Sumatera Utara.

Letak Labuhan Bilik yang strategis berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional merupakan pilihan yang menguntungkan dalam pengembangan perdagangan karena relatif komunitas pedagang masih kurang ramai jika dibandingkan di utara Sumatera Timur yang telah berkembang dengan pesat terutama di Belawan Medan misalnya atau di Teluk Nibung Asahan. Wilayah Panai ini sejatinya relatif dekat dengan Malaysia dan Singapura karena berada di jalur perdagangan antar pulau bahkan antarnegara. Menjadikan kawasan ini sebagai alternatif kegiatan perekonomian telah menarik para perantau memasuki kawasan ini untuk aktif dalam kegiatan perdagangan di Kesultanan Melayu Panai.

Dari uraian di atas dirumuskanlah beberapa pertanyaan agar dapat menjadi saluran untuk menemukan beberapa jawaban yang berkenaan dengan tampilnya kawasan ini sebagai bagian dari kegiatan perekonomian yang mendorong masyarakat lain khususnya Tionghoa untuk bermigrasi dari tempat sebelumnya. Bagaimana proses kedatangan mereka serta apa saja yang menjadi fokus

aktivitasnya dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. Persoalan ini ditelisik dengan menggunakan metode historik melalui tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah seperti yang dikutip dari Wood Gray (Sjamsudin, 2007, p. 89) memilih topik, mengusut semua evidensi (bukti), membuat catatan, kritik sumber, sistematika fakta, menyajikannya dalam satu cara yang dapat menarik perhatian dan mengomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika diukur dari ramainya para pedagang yang melintasi kawasan ini sejak zaman sebelum kedatangan bangsa Eropa. Selat Malaka merupakan pintu gerbang dunia Timur melalui jalur pelayaran setelah jalur darat mengalami masa jenuh karena gangguan keamanan akibat silih bergantinya penguasa di jalur darat yang dikenal dengan Jalur Sutera yang menghubungkan Timur dengan Barat yang pusat aktivitasnya di Laut Tengah. Pertumbuhan Selat Malaka sebagai pintu gerbang perdagangan tidak dapat dipungkiri sebagai dampak meluasnya kekuasaan Khilafah Islamiyah yang melakukan perdagangan ke wilayah Timur sembari mengembangkan Agama Islam. Wilayah Sumatera dalam sumber Cina telah dikenal dalam diplomasi perdagangan dan politik Cina. Dalam catatan T'ang yang berjudul *Xin T'ang Shu*, tercatat suatu negeri di Sumatera yang dipimpin seorang ratu bernama Sima (*Xi-Mo*), negeri ini sangat kuat dan di sini bermukim orang Arab dan Persia, mereka disebut orang *Ta-Shih* atau *Da-Shi* yang biasa digunakan di Cina abad ke-7 dan 8 mengacu kepada orang Arab dan Persia di Pantai Barat Sumatera, seperti yang dikutip dari Wade, Tjandrasasmita, Groeneveldt (Burhanuddin, 2002, p. 2).

Ramainya perdagangan di kawasan ini dapat diketahui dari asal usul daerah para pedagang yang melakukan transaksi perdagangan sejak abad ke-15, bahkan akhir abad 15, ratusan pedagang dari Arabia, Persia, India, Cina, Jawa dari Tuban, Jepara, Gresik (Rulofsz, p. 2017). Sejalan dengan ramainya para pedagang tentu mendorong tumbuhnya bandar-bandar baru yang semakin menambah ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka, munculnya kota-kota kecil adalah merupakan keniscayaan seperti Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan, Pantai Cermin, Bandar Khalifah, Pagurawan, Tanjung Tiram serta Tanjung Balai (Reid, 2005). Di antara bandar tersebut yang menambah ramainya pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka adalah Labuhan Bilik. Labuhan Bilik dalam catatan Husni (Husni, 1961, p. 78) merupakan salah satu pusat pemerintahan *Onderafdeling* dari *Afdeling* Labuhan Batu yang berpusat di sebuah desa bernama Labuhan Batu yang terletak di hulu Sei Barumun di utara Labuhan Bilik. Daerah ini sejatinya adalah bagian dari kawasan yang berada dalam kendali pemerintah kolonial Belanda, karena aktivitas pelayaran dan perdagangan yang semakin ramai sejak 1862-1920 yang semula merupakan satu desa ditetapkan menjadi pusat administrasi pemerintahan.

Labuhan Bilik menjadi tempat *Controleur* Labuhan Batu sejak 1895 (Sinar, 1971, p. 165), sejak masa itu Pelabuhan Labuhan Bilik difungsikan menjadi pelabuhan ekspor impor. Pada masa ini paspor bea cukai telah ditarik, dewasa ini semua ekspor dan impor bergerak dari tiga pelabuhan: Belawan, Teluk Nibung, Labuhan Bilik (Pelzer, 1985, p. 89). Sebagai pusat pemerintahan sebuah kerajaan, jumlah penduduknya tahun 1933 adalah 12.975 orang (Sinar, 2006, p. 408), dibandingkan dengan Medan, yang dikutip Pelly dari Siregar bahwa pada tahun 1823 berjumlah 200, tahun 1905 menjadi 14.000, kemudian menjadi 75.000 tahun 1930 dan menjelang pendudukan Jepang menjadi 85.000 jiwa (Siregar, 1980, p. 114). Sedangkan pada sensus penduduk penduduk 1980, jumlahnya sudah mencapai 1.373.747 (Pelly, 1994, p. 79).

Menampilkan jumlah penduduk dan membandingkannya dengan kota Medan adalah untuk menggambarkan bahwa sebagai pusat pemerintahan sebuah Kerajaan pada satu abad yang lalu dapat memberi informasi bahwa dinamika perekonomian dan sosial sangat berpengaruh atas tumbuh dan

kembangnya satu kota. Oleh karena Labuhan Bilik merupakan pusat kegiatan administrasi pemerintahan kolonial Belanda maka harus dilengkapi dengan berbagai institusi/lembaga yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan tersebut. Pemerintah membangun di pusat kota saluran air agar tidak banjir yang sampai sekarang masih ada, pelabuhan yang berfungsi sampai 1970-an yang sisanya masih ada berupa kantor Pelni setelah Indonesia Merdeka. Di Labuhan Bilik juga sudah dipersiapkan pelabuhan yang merupakan satu-satunya pelabuhan di Selatan Sumatera Utara. Di kota ini terdapat bioskop, kantor pos dan telegraf, perusahaan listrik, rumah sakit umum rawat inap, pasar, jejeran pertokoan, kantor pemerintah, kantor pegadaian, tangsi polisi, penjara, sumber air panas/sumur bor, pajak gadai dan pusat grosir yang dikelola orang Jerman, satu di antaranya berada persis di pinggir Sei Barumun di Pasar 1 (sekarang bangunannya sudah tidak ada lagi; diruntuh sekitar tahun 1980-an) yang dekat dengan pelabuhan, sedangkan yang satu lagi sekarang menjadi kilang padi berseberangan dengan istana Kerajaan sebelum dipindahkan ke Pasar 2. Istana ini sejajar dengan kantor Jawatan Pegadaian, Kantor Pos dan Telegraf dan sebuah hotel/penginapan yang kini menjadi pemukiman (Yushar, 2007, p. 46).

Gambaran umum tentang kemegahan Labuhan Bilik sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan menampilkan beberapa unit bangunan di atas dapat menjadi indikator betapa berperannya kawasan ini sebagai areal perniagaan di selatan Sumatera Utara, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat lain untuk mengadu nasib. Salah satu kelompok sosial yang berusaha mengadu untung di pelabuhan paling selatan dari Sumatera Utara ini adalah orang Tionghoa. Kelompok sosial ini memulai langkahnya dari Semenanjung Malaya melalui kegiatan perdagangan yang mereka lakukan secara individual maupun kelompok dalam jumlah kecil (kurang lebih lima orang). Suasana politik di daratan Cina sesungguhnya memengaruhi migrannya masyarakat Tionghoa ke Asia Tenggara. Penghujung abad ke-19, Dinasti Manchu masih berkuasa, sedang berhadapan dengan meningkatnya kegiatan bangsa Eropa di Timur; Inggris setelah Perang Candu terus mendesak pemerintahan Qing memenuhi tuntutan agar mereka boleh ambil bagian dalam perdagangan internasional, juga minta wilayah ekstrateritorial di Tiongkok, Cina di bawah Dinasti Qing makin lemah, bahkan Jepang juga minta bagian dalam perdagangan Internasional (Gondomono, 2013, p. 59).

Kondisi objektif di daratan Cina berdampak semakin banyaknya warga yang mencari penghidupan di perantauan negeri yang aman. Asia Tenggara merupakan kawasan yang relatif dekat dengan daratan Cina dan lebih menjanjikan karena tidak berada dalam konflik perang terbuka. Para perantau Cina di Asia Tenggara bermukim di Malaysia, mereka bekerja di tambang timah dan sebagai pedagang apalagi kurun tahun 1855 jung-jung yang datang dari Macau berhenti mengunjungi Makassar, dikarenakan persaingan ketat oleh kapal-kapal Tionghoa dan Inggris dari Singapura yang semakin banyak jumlahnya. Perdagangan antara Jawa dan kepulauan di wilayah timur Nusantara juga meningkat, perusahaan Wee Bin & Co., dari Singapura memiliki duapuluhan kapal untuk perdagangan di Hindia Belanda (Wirawan, 2013, p. 97). Uraian ini untuk mendeskripsikan bahwa keterlibatan orang Tionghoa di Nusantara ini sangat berpengaruh dalam sektor perdagangan dan transportasi. Sehingga tidak berbeda dengan pernyataan narasumber dalam kajian ini bahwa “kedatangan orang Tionghoa ke Sumatera Timur didorong oleh dua aktivitas perekonomian yang berkembang pesat pada penghujung abad 19 dan awal abad 20”.

Kehadiran mereka didorong oleh kegiatan perkebunan tembakau yang sedang digalakkan pemerintah kolonial, selain itu ada juga yang terdorong oleh kegiatan perdagangan yang tumbuh dan berkembang di kota-kota pelabuhan yang dibangun pemerintah kolonial. Salah satu di antaranya adalah Labuhan Bilik yang diprogram untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian di Selat Malaka. Dari pelabuhan inilah masyarakat Tionghoa masuk ke Labuhan Bilik dari Pulau Pinang Malaysia sekarang dan Singapura.

Secara umum orang Tionghoa masuk ke daerah ini secara individu dan kelompok kecil yang berjumlah kurang lebih lima orang dan mereka menekuni penghidupan di Labuhan Bilik dalam berbagai bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Secara historik kita menemukan jejak mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam ujud lapangan keterampilan seperti pandai emas, tukang jahit, tukang bangunan, pembuat perahu, nelayan, pedagang dan ada juga jadi kelompok intelektual yang menjadi pengajar di sekolah yang didirikan masyarakat Tionghoa serta ada juga kelompok keagamaan yang membina dua Vihara di sana.

Vihara itu tentunya menjadi penunjuk tentang eksistensi dari keberadaan masyarakat Tionghoa dan menjadi jejak yang tidak dapat dipungkiri. Narasumber kami menyatakan bahwa Vihara yang terdapat di sana sudah ada sejak 1885 (Indah, 2015). Pembangunan dan keberadaan Vihara ini serta merta memberikan gambaran kepada kita bahwa masyarakat Tionghoa di sini menunjukkan dinamika yang tinggi. Vihara sebagai penanda keberadaan masyarakat Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari mereka yang penghidupannya tidak lepas dari pasar. Pasar adalah institusi penghidupan yang dominan pada masyarakat pelabuhan yang menggantungkan penghidupannya pada perdagangan mengingat munculnya pelabuhan Labuhan Bilik adalah untuk meningkatkan kegiatan perekonomian yang semakin berkembang di Sumatera Timur.

Jadi adalah sebuah keniscayaan bahwa kehadiran masyarakat Tionghoa sudah menjadi bagian dari perkembangan kegiatan perekonomian di kawasan ini. Sebagai bandar perdagangan, Labuhan Bilik sejatinya terletak pada satu kawasan yang relatif strategis karena terletak pada jalur internasional di Selat Malaka dan tersembunyi karena masuk kurang lebih 12 km ke hulu Sei Barumon dalam satu garis lurus dari bibir Selat Malaka; persis di muara Sei Bilah yang berakhir di Sei Barumon.

Oleh karena itu, Labuhan Bilik sebagai pelabuhan merupakan penghubung antara pedalaman dua sungai besar dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Labuhan Bilik jadi pelabuhan pengumpul hasil bumi dari pedalaman untuk di pasarkan di pasar lokal dan Internasional. Hasil bumi seperti padi, kopra, pinang, karet, damar, semambu, kayu gaharu, jernang, kayu celup, kayu laka yang dikumpulkan di Labuhan Bilik kemudian diekspor ke Pulau Pinang/Malaysia dan Singapura. Dari kegiatan inilah mendorong orang Tionghoa yang ada di lokasi di atas mencoba berpartisipasi sehingga menghantarkan mereka ke Labuhan Bilik. Ternyata keberadaan masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik tidak terlepas dari perkembangan perdagangan di Sumatera Timur, sejak 1875 orang Tionghoa sudah bermukim di Labuhan Bilik dan berhubungan dengan para pengusaha di Semenanjung.

Demikian jugalah bahwa keberadaan masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik tentunya tidak terlepas dari kondisi objektif yang digambarkan di atas sehingga mampu memberikan validasi yang kuat tentang aktivitas orang Tionghoa di Sumatera Timur umumnya bahkan Labuhan Bilik khususnya seperti yang dicatat oleh Reid (Reid, 2011, p. 194). Perdagangan di Keresidenan ini sepenuhnya berada dalam tangan orang Cina yang sebageian besar mempunyai hubungan dengan perusahaan-perusahaan di Singapura atau Penang. Pemukiman permanen orang Cina dalam jumlah besar mulai ada tidak lama setelah Belanda menanamkan kekuasaan. Pada tahun 1875 sudah ada komunitas Cina yang cukup besar di Bengkalis, dengan sumber daya ikan dan kayu yang penting, yang tidak lama kemudian didominasi oleh orang Cina; di Tanjung Balai (Asahan) dan Labuhan Bilik (Panai), di pusat-pusat perniagaan dengan wilayah pedalaman Batak; terutama di perusahaan-perusahaan pertanian Deli.

Di pusat-pusat perniagaan ini pedagang di kawasan ini sebagian besar berhubungan dengan perusahaan di Penang dan Singapura yang umumnya didominasi oleh orang Cina di Tanjung Balai (Asahan), dan Labuhan Bilik (Panai) sebagai penghubung perniagaan dengan pedalaman Batak.

Kegiatan perdagangan di perairan Selat Malaka sejatinya dikendalikan oleh Inggris yang pelaksanaannya di lapangan dijalankan oleh orang Tionghoa. Orientasi ekonomi Kerajaan-kerajaan

Melayu di kawasan ini adalah perdagangan yang cenderung ke Semenanjung. Pada tataran inilah orang Tionghoa memainkan peran sebagai mitra perniagaan para Sultan. Di Kesultanan Panai yang pusat pemerintahannya adalah Labuhan Bilik, kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat Tionghoa tidak lepas dari pengawasan Kesultanan. Mereka bebas berdagang dengan Semenanjung dan diberi ijin untuk tinggal di Labuhan Bilik agar memudahkan komunikasi perdagangannya serta pemerintah memperoleh keuntungan dari kegiatan itu dalam ujud *belasting* (pajak) dan tentu saja cinderamata sebagai imbal jasa.

Untuk pengawasan ini di Kesultanan Panai yang mengurus bagian keuangan para pedagang Tionghoa adalah seorang kerani yang juga berfungsi sebagai penghubung antara para pedagang Tionghoa dengan Kesultanan. Di antara Kerani tersebut adalah Wan Kaharuddin yang mempunyai hubungan sosial yang dekat dengan Sultan Kelana Putra Raja Kesultanan Panai (wawancara dengan Usman). Segala yang berkaitan dengan kepentingan administrasi dengan Kesultanan diurus oleh “Kerani”, termasuk legalitas tempat tinggal mereka. Rumah yang mereka tempati tidak boleh dimiliki secara pribadi dan permanen, oleh karena itu rumah mereka dicatat atas nama Wan Kaharuddin yang bangunannya terdiri dari bangunan permanen yang kokoh sebagai bukti suksesnya mereka dalam perdagangan. Bangunan ini sekarang masih dapat dilihat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman walaupun sebagian berubah fungsi menjadi sarang burung walet dan status kepemilikannya juga sudah berubah sejalan dengan perubahan status kewarganegaraan masyarakat Tionghoa. Pelzer mencatat dalam satu hipotesisnya bahwa bertambahnya unsur Cina berarti meluasnya kemakmuran menjadi alasan mengapa para Sultan bersahabat dengan pedagang Cina (Pelzer, 1985, p. 29). Hipotesis ini terjawab di Kesultanan Panai yang berpusat di Labuhan Bilik, bahwa orang Tionghoa diberi kesempatan untuk tinggal di Kesultanan Panai untuk mengurus perdagangan ekspor dan impor ke Pulau Pinang Malaysia dan Singapura. Untuk keperluan ini pemerintah Kolonial membangun fasilitas pelabuhan dalam kegiatan perdagangan barter. Dari Labuhan Bilik dibawa komoditi perdagangan berupa kopra, kelapa sawit, kayu yang ditukar dengan bahan-bahan sandang.

Berdasarkan uraian narasumber diperoleh keterangan bahwa Labuhan Bilik pada masa ini sangat ramai dan kaya, menurut Teng Ha “sebelum bermukim di Labuhan Bilik mereka tinggal di Singapura, karena kurang mencukupi dari segi ekonomi mereka berpindah ke Labuhan Bilik dengan menumpang kapal SS Ayutia dari Singapura. Di sini kami berkegiatan perdagangan dengan dispensasi dari Sultan Panai”(Indah, 2018, p. 46). Kegiatan perdagangan di sini didukung oleh transportasi yang lancar karena ada kapal yang keluar masuk dari sini ke Pinang dan Singapura dilayani oleh SS Ayutia secara rutin. Hal ini mendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian di Labuhan Bilik yang mampu mengundang para imigran Tionghoa dari Semenanjung.

Menyikapi jumlah mereka yang semakin banyak maka pemerintah memutuskan untuk mengangkat pemimpin mereka setingkat Kapitan. Terminologi kapitan di sini digunakan dalam arti “pemimpin masyarakat” dalam bahasa Mandarin dialek Hokkian tertulis “kap-pi-tan”. Kapitan tidak memiliki kewajiban militer, namun memiliki fungsi sebagai hakim yang memutuskan persengketaan dalam perdagangan dan dalam masyarakat Tionghoa (Wirawan, 2013, p. 18), Demikian juga untuk mengurus para migran ini di Labuhan Bilik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah Kolonial yang sudah sepakat dengan Kesultanan Panai untuk memberdayakan mereka dalam sektor perdagangan/perekonomian dan sekaligus untuk mengawasi mereka secara detail.

Pengawasan secara detail ini juga ditindaklanjuti melalui pemberian izin kawasan pemukiman khusus yang terdapat di kota di pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan. Pemukiman mereka terkait dengan pasilitas kegiatan sehari-hari mereka dengan tersedianya elemen pasar, akses lalu lintas/jalan protokol, kegiatan pemerintahan/pusat pemerintahan dan tentu saja tersedia rumah ibadah/vihara sebagai wadah sosial keagamaan sesama masyarakat Tionghoa. Kehadiran orang Tionghoa di Kesultanan ini adalah merupakan keniscayaan sehingga mampu mendongkrak kegiatan

perekonomian di selatan Sumatera Utara sehingga tidak mengherankan kurun waktu 1882-1945 adalah masa keemasan kawasan ini dalam perdagangan dan mencapai puncaknya di tahun 1930-an. Orang Tionghoa mempunyai sekolah sendiri sebagai inisiatif dari tokoh-tokoh masyarakat. Teng Ha menyatakan “bahwa tahun 1932 dibangun sekolah dengan mengajarkan bahasa Mandarin dan tulis baca sampai Jepang masuk setelah itu kegiatan pendidikan dihentikan oleh Jepang” (wawancara dengan Teng Ha).

Masyarakat Tionghoa tidak hanya beraktivitas dalam perekonomian semata, mereka juga berinteraksi dan bersosialisasi dengan mempergunakan bahasa setempat/Melayu Panai sehingga memudahkan mereka berintegrasi secara budaya. Kita tidak pernah menemukan gesekan sosial di daerah ini sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Menurut narasumber kami Aleng “sejak dulu orang Tionghoa yang datang ke Labuhan Bilik dan bermukim di sini tidak pernah ada perselisihan, orang Tionghoa merasa terteram tinggal. Kami merasa satu keluarga di sini, saya merasa nyaman tinggal di sini. Sekarang banyak keluarga saya yang sudah merantau ke Medan, ke Jakarta untuk meningkatkan penghidupan yang lebih baik seperti yang dilakukan masyarakat Panai lainnya” (wawancara dengan Aleng).

Masyarakat Tionghoa yang ada di Panai sejatinya berasal dari Fu Kien dan Kwan Tung di pantai Selatan dan Tenggara Cina. Mereka sesungguhnya terdiri dari beberapa suku yakni Hokkian; mereka dikenal juga sebagai orang Minnan atau orang Hok-lo, jumlah mereka sekarang di daerah ini tinggal lima belas KK sebagian pindah ke Medan, Binjai, Rantau Prapat. Mereka yang masih menetap menjadi pedagang/jualan dan nelayan. Hakka adalah bagian dari orang Han yang dikenal dengan dialek/bahasa Khek, mereka umumnya berasal dari pegunungan di Provinsi Guandong, profesi mereka umumnya adalah pandai emas jumlah mereka sangat sedikit kurang dari lima KK dan sekarang sudah tidak ada lagi di daerah ini pindah ke Rantau Prapat dan Medan. Orang Theo Chiu mereka adalah kelompok petani yang jumlah mereka sangat sedikit, sekarang mereka tidak ada lagi di daerah ini. Profesi mereka adalah petani yang sejatinya tidak cocok di daerah ini sehingga keberadaan mereka tidak terlalu berkesan di daerah ini (wawancara dengan Beng Hok).

Dari komunitas sosial di atas dapatlah dipahami bahwa kehadiran mereka di Labuhan Bilik berkelindan dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan di Selat Malaka yang menjadi sentra kegiatan transaksinya di Semenanjung Malaya. Mereka tinggal di rumah bangunan batubata dan kayu sebagai tempat tinggal dan tempat berdagang untuk kebutuhan sehari-hari seperti daging, ikan, sayur-mayur dan peralatan rumah tangga. Tipe bangunan Tionghoa ini masih dapat kita temukan sepanjang perjalanan dari Medan di utara ke selatan sampai Labuhan Bilik yang melintasi kota-kota lama seperti Lubuk Pakam, Perbaungan, Rampah, Tebing Tinggi, Kisaran, Aek Kanopan, Rantau Prapat, Labuhan Bilik. Walaupun mereka tinggal di barisan ruko, di Labuhan Bilik mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat berjalan dengan harmonis. Percakapan mempergunakan bahasa Melayu Panai sebagai bahasa pengantar sehingga mereka tidak canggung berkomunikasi dan bercengkerama dengan masyarakat sehari.

Pada masa kebijakan pemerintah untuk melepas identitas Tionghoa diberlakukan seperti penggunaan bahasa, perayaan agama, pemakaian nama, tujuannya adalah untuk memutus mata rantai etnosentris yang berkaitan dengan perubahan politik di Indonesia. Hal ini tentu terkait dengan Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi No.14/1967 pada 6 Desember 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (Setiono, 2008). Adapun isi dari instruksi tersebut tentu berimbas bagi masyarakat Tionghoa di Labuhan Bilik. Kita dapat melihat di pintu rumah warga Tionghoa ada ditempel/ditulis RRT yang berarti pemilik rumah adalah warga negara Cina (WNA) yang harus dikembalikan ke RRT. Manakala pintu rumahnya tidak terdapat tulisan itu berarti penghuninya adalah WNI. Hal ini mencemaskan mereka yang bukan warga Indonesia, sehingga sejak itu satu per satu orang Tionghoa berpindah dari Labuhan Bilik. Terakhir masyarakat Tionghoa

membuat keramaian tahun 1969 dalam satu kegiatan pertandingan olahraga basket yang sangat meriah dan ramai, sejak itu satu persatu keluarga Tionghoa berpindah. Saat ini warga Tionghoa tinggal 2 KK saja (wawancara dengan A. Yushir) sebagian besar rumah mereka telah berubah menjadi penangkaran burung walet.

Perpindahan ini berawal tahun enam puluhan ketika menurunnya kegiatan perekonomian di Labuhan Bilik terkait dengan perubahan yang terjadi pada sumber daya ekonomi dengan menurunnya komoditi pertanian. Berkurangnya hasil pertanian dan jalur pelayaran yang hampir tidak berfungsi karena perkembangan jalur transportasi darat. Pertanian yang ditanam pada masa kolonial Belanda tidak pernah mengalami peremajaan sehingga produktivitasnya pun menurun secara drastis. Oleh karena itu para migran Tionghoa yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan mencari alternatif di daerah lain atau pindah ke kota-kota yang disebut di atas. Selain itu kebijakan mengembalikan warga Tionghoa yang diidentifikasi sebagai warga RRC yang harus dikembalikan ke negara asalnya mengakibatkan pemukim Tionghoa memilih migrasi ke daerah lain.

Awal tahun 1960-an mereka secara keluarga meninggalkan Labuhan Bilik menuju ke kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara seperti Medan, Binjai, Tanjung Balai, Rantau Prapat, Tebing Tinggi, Kisaran bahkan ke Jakarta sehingga hanya beberapa keluarga saja yang masih menetap di Labuhan Bilik karena sudah menganggap Labuhan Bilik sebagai kampung halaman di mana pemakaman keluarga ada di sini. Hal ini dibuktikan manakala ada kegiatan ziarah leluhur/Cengbeng mereka akan kembali untuk berziarah, apalagi transportasi darat dapat ditempuh dengan roda empat sampai ke Labuhan Bilik dan bahkan melintasi jalan ke pemakaman keluarga mereka.

## SIMPULAN

Kehadiran masyarakat Tionghoa pada dasarnya mampu menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian kawasan yang menjadi pemukiman mereka karena kehadiran mereka dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Dengan membina semangat persaudaraan dan interaksi yang lebih terbuka mereka mampu menepis perbedaan sosial budaya sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Kehadiran mereka sejalan tentunya dengan perkembangan pelayaran sebagai media transportasi. Sektor perdagangan nelayan menjadi alternatif pekerjaan mereka selain bidang jasa. Manakala terjadi perubahan kebijakan politik yang mengkategorikan warga Tionghoa WNI dan warga Tionghoa WNA berdampak bagi kehidupan mereka di Labuhan Bilik. Dalam perubahan jalur transportasi di kawasan ini berdampak pada kegiatan perekonomian secara drastis sehingga menjadikan kawasan ini sebagai daerah yang mati sebagai sentra ekonomi. Komunikasi jalur air sudah ditinggalkan sementara pembangunan komunikasi jalur darat tidak mengalami perbaikan, hal ini mengakibatkan wilayah ini jadi terpencil terutama dari geliat ekonomi perdagangan yang mengandalkan transportasi darat. Sekarang hampir dapat dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa di daerah ini hampir tidak berperan dalam sektor perekonomian seiring matinya pelabuhan Labuhan Bilik, yang tersisa adalah jejak masa lalu berupa fasilitas yang menunjukkan aktivitas masa lalu yang kini membisu.

## REFERENSI

- Burhanuddin, Jajat. (2017). *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Husni, T.M. Lah. (1961). *Masyarakat Melaju Sumatera Timur*. Medan: BP Husni.
- Pelly, Usman. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Pelzer, Karl J. (1985). *Toean Keboen dan Petani Politik: Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Reid, Anthony. (2005). *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Reid, Anthony. (2011). *Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.



- Rulofsz, M. (2016). *Persaingan Eropa & Asia di Nusantara: Sejarah Perniagaan, 1500 -1630*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sari, Sri Dewi Indah Permata. (2018). "Sejarah Etnis Tionghoa di Labuhan Bilik, 1900-1969." *Skripsi*. Medan: Jurusan Pendidikan Sejarah Unimed.
- Setiono, Benny G. (2008). *Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengupas Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Trans Media.
- Sinar, T. Luckman. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wirawan, Yerry. (2013). *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari abad ke-17 hingga ke-20*. Jakarta: Gramedia.